Halaman

Dua Kadis di Medan Ditetapkan Tersangka

Dari Halaman 1

kata Kajari Medan Fajar Syah Putra, Kamis (13/11/2025).

Kejari Medan sendiri telah menetapkan tiga tersangka, salah satunya Erwin Saleh yang saat ini menjabat Kadis Perhubungan Medan. Namun Erwin tidak hadir sehingga tidak dilakukan

Erwin sendiri saat itu menjabat Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Medan sekaligus PPK.

'Hari ini kita sudah menetapkan tiga orang

tersangka sebenarnya, yang datang baru dua, satu lagi tadi datang penasehat hukumnya dengan keterangan sakit," ucapnya.

Anggaran untuk kegiatan Medan Fashion Festival tahun 2024 mencapai Rp 4,8 miliar. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai

Rp 1,1 miliar.
"Kemarin sudah dilakukan penghitungan mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan bersama dengan Inspektorat Kota Medan, didapat nilai kerugian itu sebesar Rp 1.132.000.000," ucapnya

Benny dan MH sendiri ditahan saat ini di

Rutan Tanjung Gusta Medan. Sedangkan Erwin bakal dilakukan pemanggilan ulang di hari Senin (17/11).

"Kalau tidak hadir kita lakukan pemanggilan kedua, kalau tidak hadir akan kita lakukan upaya paksa," tuturnya.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupal sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(A-10)

Arif Budiman Simatupang menegaskan,

tindakan ini bukan hanya masalah etika, tetapi

juga pelanggaran terhadap undang-undang

Upacara, dan Tata Penghormatan.

matan upacara sumpah jabatan.

Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Secara jelas mengatur tentang Tata Tempat, Tata

Pelaksanaan di pasar melanggar prinsip Tata

Tempat yang mensyaratkan kewibawaan acara

Tata Penghormatan yang wajib mencakup

pemasangan simbol negara (Foto Presiden dan

Wapres) jelas diabaikan, merendahkan kekhid-

ingin disampaikan Wakil Walikota, tetapi nilai-

nilai simbolis tidak boleh mengesampingkan

hukum positif yang mengatur tata laksana ne-

layak," tutup Walikota LIRA Binjai, seraya

gara. Pelantikan harus dilakukan di tempat yang

menyatakan akan melaporkan kasus itu kepada

"Kami tidak menampik makna simbolis yang

Gerindra Sumut Tolak

Dari Halaman 1

hanya mencari perlindungan ke Gerindra.

Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prsetyo mengatakan, Budi Arie belum sesuai dengan garis perjuangan partai. Jona menyebut, penolakan kepada Budi Arie juga demi menjaga maruah Presiden Prabowo di masyarakat. Menu-

rutnya, sejumlah pemberitaan negatif yang tertuju kepada Budi Arie akan merusak citra partai. "Kita tahu saat ini masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Prabowo. Kita tidak ingin ada hal-hal yang kemu-

dian merusak rasa cinta, kepercayaan masyarakat terhadap

Presiden," ujarnya, dilansir dari CNNIndonesia, Kamis Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menyebut sudah mendengar aspirasi dari kader di tingkat DPC. Menurutnya, seluruh DPC Gerindra juga meminta agar Budi Arie

tidak bergabung dengan Gerindra. "Kader partai di akar rumput setia dan loyal kepada Gerindra. Makanya aspirasi dari mereka perlu didengar,"

Sementara itu Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar Gusmiyadi menduga Budi Arie hanya ingin berada di lingkaran kekuasaan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.

"Rencana Budi Arie untuk bergabung ke partai Gerindra dipersepsikan masyarakat sebagai langkah pragmatis guna menjaga peluang dirinya untuk tetap berada pada episentrum kekuasaan Prabowo," kata Gusmiyadi.

Gusmiyadi juga menyinggung terkait kasus hukum yang berpotensi menjerat Budi Arie. Selain itu, Budi Arie juga dinilai bergabung karena ingin mendapat posisi penting dari Prabowo.

"Langkah pragmatis tersebut dibaca sebagai sebuah cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya dan di sisi lain Budi Arie juga tentu berharap masih bisa mendapat posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ujarnya.

Anggota DPRD Sumut ini khawatir langkah Gerindra menerima Budi Arie justru bakal menurunkan kepercayaan

"Di sisi lain, baru-baru ini klaim Budi Arie soal arti nama Projo dan kaitannya dengan logo wajah Jokowi juga dinilai sebagai langkah tidak beradab dalam memainkan catur politik. Sanggahan Budie Arie bahwa selama ini Projo bukan singkatan Pro Jokowi tapi berati rakyat dan negeri merupakan langkah zig zag yang tidak pantas," katanya.

Sebelumnya, Budi Arie menyatakan bakal ada gelombang besar anggota Projo bergabung ke Partai Gerindra.

Ia mengatakan saat ini masih terus melakukan sosialisasi sekaligus menjalankan konsolidasi internal Projo.

"Lihat saja nanti, kita kan lagi terus sosialisasi dan konsolidasi, nanti ada gelombang besar," kata Budi Arie di Inside Politics with Diana Valencia CNN Indonesia TV, Selasa (4/11) malam.

Budi Arie mengatakan niatnya masuk ke Gerindra sebagai bentuk penguatan terhadap sistem presidensialisme di bawah Presiden RI Prabowo Subianto. (cnni/js)

Pemko Binjai Dinilai Lecehkan Martabat Negara

Dari Halaman 1

rin F Simanjuntak.

Kemudian, Kepala BKD Rahmat Fauzi menyebarkan pengumuman via grup WhatsApp pada malam hari (11/11/2025), yang mengubah lokasi dari aula Pemko ke komplek Pasar Tavip yang sudah setahun direnovasi tetapi tidak diresmikan dan ditetapkan menjadi 09.30 WIB.

Ironisnya, saat pelaksanaan, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan yang diminta hadir 09.30 WIB harus menunggu hingga Pukul 11.00 WIB (sesuai jadwal awal), menciptakan kesan molor dan ketidakpastian manajemen acara yang merugikan disiplin

Sementara, Walikota LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kota Binjai Arif Budiman Simatupang menilai kebijakan Pemko yang amburadul dan sudah dualisme kepemimpinan. Menurutnya, alasan simbolis yang disampaikan

memanggil dan memeriksa Ketua DPRD

Zakky Sahri yang disebut-sebut ikut berperan

Ia menilai, praktik dugaan kolusi antara

oknum legislatif dan pihak pengembang harus

dibongkar secara transparan agar tidak men-imbulkan kecurigaan publik bahwa penegakan

hukum hanya berlaku bagi pihak tertentu saja. Azmi juga menegaskan, KAMAK akan men-

dalam kebijakan terkait proyek Citraland,"

tegas Azmi Hadly, Kamis (13/11/2025).

Wakil Walikota melanggaran regulasi formal.

"Kami mencatat tiga pelanggaran mendasar. Pertama, pelanggaran Tata Tempat karena acara sakral pelantikan pejabat tinggi Pratama dibawa ke pasar yang tidak memiliki unsur kekhidmatan," tegas Arif Budiman Simatupang.

Kedua, ia menyoroti pelanggaran keras Tata Penghormatan Negara.

"Saat pelantikan di Pasar Tavip, dapat dipastikan tidak ada pemasangan Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah kelalaian fatal. Sebab, acara resmi yang diselenggarakan pemerintah wajib mencantumkan simbol negara. Ini bukan sekadar acara pribadi, ini adalah penyerahan amanah negara!" sambungnya.

Ketiga, lanjutnya, ketidakpastian kebijakan yang dimulai dari surat resmi dan diubah mendadak melalui pesan singkat.

"Ini menunjukkan ketidak profesionalan dalam tata kelola pemerintahan," pungkasnya.

gawal proses hukum kasus Citraland dan siap

menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor

Kejatisu bila lembaga penegak hukum tersebut

"Kami tidak ingin Kejatisu menjadi alat

politik atau tameng bagi elite daerah. Semua

yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang

bulu. Kalau Kejatisu takut periksa Zakky Sahri,

itu artinya hukum di Sumut belum benar-benar

Kasus Citraland Deli Serdang disebut-sebut

dianggap "main mata" atau memperlambat

Kemendari di Jakarta.(B-016) Kejatisu Didesak Periksa Ketua DPRD Deli Serdang melibatkan sejumlah proyek pengembangan lahan yang diduga melanggar aturan tata ruang

> 'Kami akan terus kawal. Jika Kejatisu tidak berani bersikap profesional, kami akan bawa isu ini ke Kejagung dan KPK," pungkasnya.(A-10)

laporan masyarakat telah disampaikan ke Kejatisu, namun hingga kini proses hukumnya belum menunjukkan perkembangan signifikan. Azmi menutup dengan peringatan keras agar aparat penegak hukum tidak bermain-main dengan keadilan.

dan merugikan keuangan daerah. Sejumlah

HMI Sumut Bongkar Dugaan Kolusi Rugikan Negara

penanganan perkara.

Dari Halaman 1

Dari Halaman 1

ada permufakatan jahat antara oknum pejabat bank dengan pihak koperasi. Proses pencairan dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian perbankan, dan indikasi penyimpangan sangat jelas," tegas Fuadi, Kamis (13/11/2025).

HMI Sumut menemukan sejumlah kejanggalan mencolok dalam proses pembiayaan tersebut. Di antaranya, banyak penerima dana bukan merupakan karyawan PT Asam Jawa, namun tetap menerima pembiayaan dari koperasi. Bahkan, ada penerima yang tidak memiliki pinjaman resmi dan sebagian memperoleh pinjaman melebihi plafon yang diatur.

Lebih lanjut, penjaminan dana tidak diklaim dan bernilai nol, sehingga menimbulkan potensi

gagal bayar. Proses pencairan dan persetujuan juga disebut tanpa investigasi risiko yang memadai, padahal indikasi gagal bayar sudah bisa diprediksi sejak awal.

'Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang sistematis dan indikasi kuat tindak pidana korupsi serta kolusi antara oknum pejabat BSI dengan pihak koperasi," lanjut Fuadi.

Desak Kejati Sumut Turun Tangan Badko HMI Sumut mendesak manajemen pusat BSI untuk segera melakukan audit terbuka terhadap seluruh proses pembiayaan Koperasi Karyawan Setuju PT Asam Jawa dan mengumumkan hasilnya ke publik

Selain itu, HMI juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar segera menyelidiki, menangkap, dan mengadili seluruh oknum

pejabat BSI yang terlibat apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan permufakatan jahat.

"Kami menuntut audit terbuka dan tindakan hukum tegas. Jika terbukti, kami minta Kejati Sumut menangkap dan mengadili mereka seberat-beratnya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," tegas Fuadi.

Siap Turun ke Jalan

Fuadi menegaskan, HMI Sumut tidak akan tinggal diam. Pihaknya akan melakukan advokasi publik, melaporkan kasus ini ke lembaga penegak hukum, dan turun ke jalan bila tidak ada langkah tegas dari otoritas terkait.

Kami tidak akan berhenti sebelum kasus ini diusut tuntas. Integritas lembaga keuangan syariah harus dijaga dari tangan-tangan kotor yang merusak amanah umat," pungkasnya.(A-10)

Kejati Sumut 'Obrak-abrik' Kantor Inalum

Dari Halaman 1

Kamis (13/11/2025).

Ia menjelaskan penggeledahan berlangsung sejak pukul 10.30 WIB hingga 16.00 WIB, di beberapa ruangan strategis, antara lain ruang Direktur Keuangan, Direktur Layanan Strategis, Direktur Produksi, Direktur Pelaksana dan Pengembangan Bisnis, Direktur Human Capital, Kepala Departemen Logistik/Pengadaan, serta ruang penyimpanan arsip di gedung kantor PT Inalum.

"Dari hasil penggeledahan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting berupa surat pengiriman dan penjualan produk

aluminium oleh PT Inalum kepada pihak swasta, laporan keuangan, serta dokumen lainnya yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang tengah disidik," tegas dia.

Dokumen-dokumen itu, lanjut dia, antara lain memuat proses penjualan mulai dari tahap perencanaan hingga pembayaran hasil penjualan produk aluminium oleh PT Inalum.

Indra menambahkan, penggeledahan hari ini dilakukan berdasarkan surat persetujuan atau penetapan izin geledah dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus.TPK-GLD/2025/PN.Mdn, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejati Sumatera Utara

Nomor 16/L.2/Fd.2/11/2025 tanggal 5 November

"Setelah penggeledahan ini, diharapkan alat bukti yang diperoleh dapat menyempurnakan proses penyidikan dan membuat penanganan perkara menjadi lebih terang," kata Indra.

Indra menjelaskan kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penjualan aluminium oleh PT Inalum kepada PT PASU Tbk pada tahun

"Penyidik hingga kini masih melakukan penyidikan mendalam untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus dugaan tersebut," tegas Indra.(bes)

MK Putuskan Polisi Aktif Tidak Boleh Menduduki

Dari Halaman 1

28 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2002 tentang

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Kamis 13 November

Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian inkonstitusional. Putusan dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 itu menegaskan anggota Polri hanya dapat menduduki

jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, seluruh penugasan anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian kini kehilangan dasar

Mahkamah menyatakan, frasa tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. "Frasa itu menimbulkan ketidakjelasan dan memperluas makna norma, sehingga harus dinyatakan tidak konstitusional," ujar Suhar-

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan seluruh substansi UU Polri harus dimaknai selaras dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut kepolisian sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Walaupun TAP MPR Nomor VII/ MPR/2000 telah dicabut melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003, semangat dan politik hukum yang terkandung di dalamnya tetap merefleksikan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945," kata Ridwan saat membacakan pertimbangan hukum. (tempat/js)

Ada yang Retak di Balik Jendela Bank Sumut

Dari Halaman 1

yabg punya peran penting di kota ini, berinisial Z. Ia pernah menjabat Kepala Kantor Cabang Pembantu Krakatau, tempat praktik itu

Konon, satu agunan dijaminkan di dua bank berbeda.Keduanya cair. Dan kredit di Bank Sumut itu bermasalah, seperti luka lama yang terbuka lagi.

Jika benar, maka ini bukan sekadar keteledoran. Ini permainan yang rapi dan berani. Tapi di tengah semua hiruk-pikuk, ada hal yang lebih menyedihkan, yakni kepercayaan publik yang

perlahan runtuh. Bank Sumut bukan milik segelintir pejabat, tapi milik rakyat Sumatera Utara. Uang yang berputar di sana, berasal dari keringat para

nasabah. Ada guru, petani, pedagang dan ASN yang selama ini percaya bahwa lembaga ini aman. Lalu, apa jadinya bila kepercayaan itu dijadikan bahan permainan?

Kita tahu, korupsi di lembaga keuangan bukan sekadar soal angka. Ia soal moral. Tentang bagaimana amanah disulap menjadi peluang. Tentang bagaimana jabatan dijadikan perisai untuk mencuri dalam terang.

Z memang belum bicara. Mungkin sedang menyiapkan alasan, atau sekadar berharap lupa publik. Tapi diam panjang juga bisa berarti banyak hal, terutama bagi publik yang sudah muak dengan kalimat pembelaan.

Bank Sumut kini berada di ujung tanduk reputasi. Setiap kasus baru bukan lagi sekadar "catatan hukum", tapi paku tambahan di peti kepercayaannya. Dan di luar sana, warga mulai berbisik, "Masih aman uangku di sana?"

Jika manajemen Bank Sumut masih merasa semua ini sekadar badai kecil, maka mereka salah besar. Ini bukan hujan, ini erosi. Sedikit demi sedikit, mengikis fondasi kepercayaan yang dulu kokoh.

Mungkin sudah saatnya bank ini bercermin. Bukan di dinding kaca gedung megahnya di Medan, tapi di wajah para nasabah yang mulai ragu. Apakah kejujuran masih punya tempat di ruang rapatnya? Apakah jabatan masih berarti

amanah, atau sekadar tangga menuju kuasa? Di ujung semua tanya ini, hanya ada harapan yang tersisa. Semoga Bank Sumut tak sepenuhnya kehilangan jiwanya. Sebab jika bank daerah sudah tak bisa dipercaya, maka Sumatera Utara kehilangan satu denyut nadi penting bernama kepercayaan itu sendiri.

Hidayah Korupsi Tak Pernah Mati Dari Halaman 1

ribuan orang dijebloskan ke penjara, meski lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan inspektorat bekerja tanpa

Jawabannya tidak tunggal. Korupsi di Indonesia bukan sekadar tindakan individu yang tamak, melainkan bagian dari ekosistem sosial-politik yang korup. Ada jaringan kepentingan yang saling menopang pejabat, kontraktor, oknum aparat, bahkan sebagian politisi. Proyek-proyek publik dijadikan ladang. Acara seremonial, festival, hingga bantuan sosial menjadi alat distribusi rente. Dalam kasus MFF, pola lama berulang: laporan fiktif, mark-up anggaran, dan lemahnya pengawasan.

Penegakan hukum pun sering kali setengah hati. Dalam kasus MFF, salah satu tersangka tidak hadir saat pemanggilan pertama dengan alasan sakit. Publik tentu masih ingat, betapa sering alasan yang sama digunakan untuk mengulur proses hukum. Di titik inilah, hukum kehilangan wibawanya. Rakyat kehilangan kepercayaan. Seolah keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Namun, masalah paling mendasar sebenarnya bukan di ruang sidang, melainkan di ruang batin bangsa ini. Korupsi tumbuh subur karena kita mengalami krisis nilai dan moralitas publik. Kita terbiasa mendengar berita korupsi setiap minggu tanpa lagi merasa marah. Masyarakat hanya mengeluh, bukan bergerak. Media menyorot sejenak, lalu berlalu. Padahal diamnya publik adalah oksigen bagi

Lebih jauh lagi, korupsi tidak dapat dilepaskan dari politik uang. Banyak pejabat lahir dari sistem politik yang mahal. Dana kampanye, mahar partai, dan biaya dukungan harus "dikembalikan" ketika berkuasa. Jabatan bukan lagi amanah, melainkan investasi. Maka, begitu menjabat, proyek publik menjadi ladang "pengembalian modal". Korupsi bukan karena kurang gaji, melainkan karena keserakahan yang dilegalkan oleh sistem politik transaksional.

Dari sudut pandang nilai keislaman, akar korupsi adalah hilangnya tauhid sosial kesadaran bahwa kekuasaan dan rezeki sejatinya berasal dari Allah, bukan dari jabatan atau uang. Ketika tauhid digantikan oleh hasrat duniawi, jabatan menjadi alat memperkaya diri, bukan sarana mengabdi. Seharusnya setiap pejabat merasa diawasi bukan hanya oleh auditor, tetapi oleh Allah dan nuraninya

Kasus Medan Fashion Festival menjadi cermin salah urus prioritas publik. Ketika dana miliaran dihabiskan untuk kemegahan seremonial di kota yang masih berjuang mengatasi ketimpangan, maka korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap rasa keadilan sosial. Ini bukan sekadar kejahatan administrasi, tapi pembusukan moral negara.

Korupsi memang sulit diberantas hanya dengan lembaga penegak hukum. KPK, kejaksaan, atau polisi dapat menindak, tetapi tidak bisa memperbaiki jiwa bangsa. Reformasi hukum harus disertai reformasi moral dan spiritual. Kita membutuhkan transparansi anggaran yang terbuka bagi publik, pendidikan antikorupsi yang hidup dan bermakna, serta keteladanan dari pemimpin yang berani hidup sederhana.

Korupsi tidak akan mati hanya dengan hukuman, tetapi dengan keberanian untuk tidak ikut bermain. Ia hanya akan berhenti ketika kita berhenti menoleransinya di rumah, di kampus, di kantor, dan di ruang-ruang kekuasaan.

Karena selama kekuasaan dianggap sebagai jalan memperkaya diri, bukan amanah untuk melayani rakyat, berita seperti kasus Medan Fashion Festival ini akan terus berulang, dari masa ke masa.